

**LAPORAN KULIAH KERJA LAPANGAN  
DI DESA JANDI  
( Kecamatan Juhar, Kabupaten Karo)**

**Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai ( BLT ) Pada Masyarakat  
Miskin di Desa Jandi, Kecamatan Juhar, Kabupaten Karo**

**Oleh :**

**Ariel A Manihuruk**

**178510027**



**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL POLITIK**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**2020**

# LAPORAN KULIAH KERJA LAPANGAN

## DI DESA JANDI

(Kecamatan Juhar, Kabupaten Karo)

Judul Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada Masyarakat Miskin  
di Desa Jandi, Kecamatan Juhar, Kabupaten Karo

Disusun Oleh :

**Ariel A Manihuruk**

**178510027**



JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MEDAN AREA

2020

# LEMBAR PENGESAHAN KULIAH KERJA LAPANGAN

Laporan Kuliah Kerja Lapangan ini disusun oleh :

**NAMA** : Ariel A Manihuruk

**NPM** : 178510027

**PRODI** : Ilmu Pemerintahan

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam penilaian laporan Kuliah Kerja Lapangan

Medan, Agustus 2020

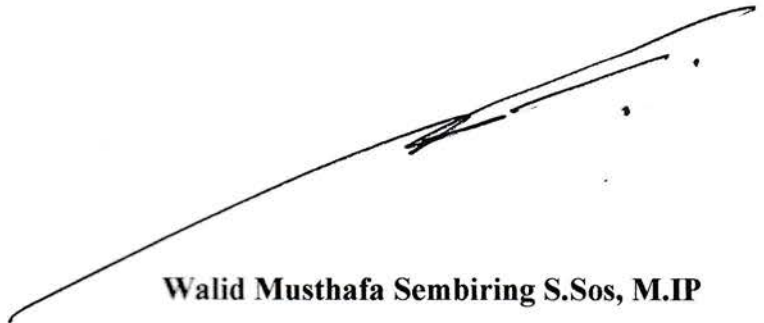
Mengetahui :

**Mahasiswa**

**Dosen Pembimbing**



**Ariel A Manihuruk**



**Walid Musthafa Sembiring S.Sos, M.IP**

**Ketua Program Studi,**

**Kepala Desa**



**UNIVERSITAS MEDAN AREA S.Sos, M.IP**



**Pirma Pinem**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan laporan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) dengan baik di "KANTOR KEPALA DESA JANDI". Laporan Kuliah Kerja Lapangan ini disusun sebagai persyaratan untuk menyusun Skripsi atau Tugas Akhir dan bukti pelaksanaan Mata kuliah Di Program Sarjana Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

Laporan Kuliah Kerja Lapangan ini ditulis berdasarkan informasi yang didapat dari berbagai pihak selama pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan pada tanggal 13 Juli 2020 s/d 12 Agustus 2020 di KANTOR KEPALA DESA JANDI.

Terima kasih kepada seluruh keluarga penulis terkhususnya Orang tua saya, sanak saudara saya dan teman-teman Kuliah Kerja Lapangan (KKL) yang selalu mendoakan penulis dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan ini.

Terlebih lagi penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area
2. Dr. Heri kusmanto, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area
3. Evi Yunita Kurniaty, S.sos, M.IP selaku Kepala Program Studi Ilmu Pemerintahan
4. Walid Musthafa Sembiring S.Sos, M.IP selaku Dosen Pembimbing Selama Kuliah Kerja Lapangan (KKL)
5. Pirma Pinem selaku Kepala Desa Jandii
6. Kepada seluruh masyarakat desa Jandi yang memberikan tempat selama Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di KANTOR KEPALA DESA JANDI
7. Kepada Seluruh Perangkat Desa JANDI Yang selalu memberi arahan

UNIVERSITAS MEDAN AREA kepada penulis selama menjalani Kuliah Kerja Lapangan

8. Kepada Orang Tua penulis Yang sudah mendukung penulis mulai dari doa dan materi sehingga laporan penulis bisa selesai tepat waktu
9. Kendala yang dihadapi penulis pada saat melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan adalah Jauhnya jarak tempuh lokasi KKL dari tempat tinggal penulis sehingga penulis membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menempuh perjalanan menuju lokasi KKL
10. Harapan penulis dalam penulisan Laporan KKL semoga laporan yang dibuat penulis memberikan pengetahuan dan berdampak positif bagi pembaca

Medan, Agustus 2020

Penulis,

**Ariel A. Manihuruk**  
**178510027**

## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar</b> .....	i
<b>Daftar Gambar</b> .....	v
<b>Daftar Tabel</b> .....	vi
<b>Daftar Lampiran</b> .....	vi
<b>BAB I. Pendahuluan</b> .....	1
1.1. Latar Belakang KKL .....	1
1.2. Tujuan KKL .....	1
Tujuan Umum .....	1
Tujuan Khusus.....	2
1.3. Profil Desa Jandi .....	2
<b>BAB II. Tinjauan Pustaka</b> .....	4
2.1. Peran Pemerintah Dalam Perekonomian .....	4
1. Peran Alokasi .....	4
2. Peran Distribusi.....	4
3. Peran Stabilisasi .....	4
2.2. Kemiskinan.....	5
1. Definisi Kemiskinan.....	5
2. Penyebab Kemiskinan.....	6
3. Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan.....	7
<b>BAB III. Metodologi Pelaksanaan KKL</b> .....	13
3.1. Tempat dan waktu KKL .....	13
3.2. Metodologi KKL .....	13
3.3. Rangkuman Pekerjaan yang dilakukan selama KKL.....	14
<b>BAB IV. Hasil Dan Pembahasan</b> .....	15
4.1. Hasil dan Pembahasan .....	15
<b>BABV. Kesimpulan dan Saran</b> .....	18
5.1. Kesimpulan .....	18
5.2. Saran .....	18
<b>Daftar Pustaka</b> .....	19
<b>Lampiran</b> .....	20

## DAFTAR GAMBAR

Daftar 1: Gambar dengan pelayanan posyandu .....	22
Daftar 2: Gambar pemasangan bendera di kandor kades .....	22
Daftar 3: Bantuan BLT tahap ke 3 .....	23
Daftar 4 : Acara perpisahan dengan kepala desa .....	23

## DAFTAR TABEL

Tabel I. silsilah kepemimpinan desa Jandi .....	2
---	---



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang KKL

Mata Kuliah Kerja Lapangan (KKL) adalah mata kuliah wajib bagi seluruh program studi Universitas Medan Area . Mata kuliah ini bertujuan agar para Mahasiswa universitas Medan Area selain mendapatkan pengajaran di kampus juga mendapatkan ilmu diluar kampus yaitu dengan melaksanakan kuliah kerja lapangan.

Sebagai Mahasiswa tentu dituntut mampu memahami dan mengaplikasikan ilmu yang didapat selama kuliah kedalam dunia kerja. Dengan pembekalan teori dan ilmu yang didapat dalam kelas tidak cukup untuk membekali mahasiswa agar memiliki kemampuan lain. Dan tujuan pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan ini adalah agar mahasiswa dapat menerapkan hasil yang didapat selama belajar di kampus untuk di terapkan di masa yang akan datang yaitu didunia kerja.

Kepala desa atau sebutan lain sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk 3 (tiga) kali masa jabatan berikutnya berturut-turut atau tidak.[1] Kepala desa tidak bertanggung jawab kepada Camat, tetapi hanya dikoordinasikan saja oleh Camat. Kepala desa bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa .

## 1.2. Tujuan KKL

### 1.2.1. Tujuan Umum

1. Menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama perkuliahan dalam bentuk praktek kerja pada instansi/lembaga/industri juga menelaah apakah terjadi perbedaan
2. Mampu berbicara dan bersosialisasi dengan dunia industri/instansi/lembaga
3. Melatih mahasiswa untuk bekerja mandiri dilapangan dan menyesuaikan diri dengan kondisi lapangan pekerjaan yang nanti akan ditekuni
4. Menambah wawasan mahasiswatentang kerja dan manajemen instansi/lembaga/industri

### 1.1.1. Tujuan Khusus

1. Menambah wawasan mahasiswa
2. Membina hubungan baik antara kampus dengan instansi/lembaga/industri penyedia kesempatan magang
3. Meningkatkan Kualitas mahasiswa

## 1.3. PROFIL DESA JANDI

Pada awalnya istilah nama desa jandi terjadi pada perjanjian antara penduduk setempat sehingga muncul lah nama desa jandi.pada awalnya desa jandi sebelah timur desa yaitu dekat parit sabah kenjulu,pada saat itu penduduk yang mendiami tempat itu tidak sehat yang tidak wajar maka desa dipindahkan diperladangan juma gugung sebelah tenggara desa,disana pun kejadiannya sama,maka di pindahkan lagi kepulu balang sebelah barat desa,disanapun kejadiannya sama,maka masyarakat berjanji desa yang sekarang dalam perjanjian mereka akan pindah jauh dari desa tersebut jika kejadiannya sama tapi hasilnya tidak, maka bertahanlah sampai sekarang oleh sebab itu nama desa jandi berasal dari kata **janji**.

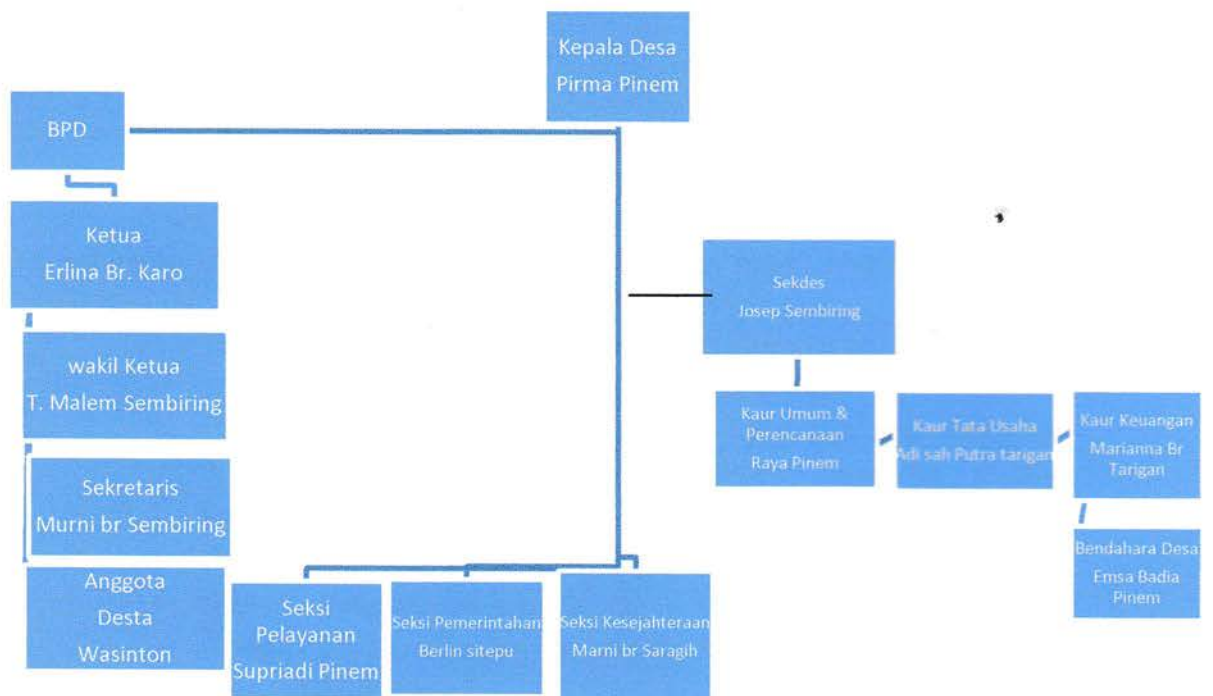
Desa ini berjarak lebih kurang 12 km dari ibu kota kecamatan juhar. Yang merupakan hasil dari desa Jandi adalah sebagai berikut,tanaman

jagung,coklat,padi,cabe,sirih dll. Tanah desa Jandi termasuk subur sehingga kehidupan warga desa Jandi agak makmur,hanya saja cuaca sangat berpengaruh terhadap tanaman yang ditanam desa tersebut.

Berikut adalah silsilah kepemimpinan desa Jandi :

No	NAMA	PERIODE
1	Japalung Pinem	1983 - 1988
2	Rapan Pinem	1988 - 1993
3	Demu Ginting	1993 - 1998
4	Biasa Pinem (PJ)	1998 - 2003
5	Setia Tarigan	2003 - 2008
6	Mardiana Br. Pinem	2008 - 2013
7	Josep Sembiring (PJ)	2013 - 2018
8	Pirma Pinem	2018 - 2023

### Struktur Organisasi Desa Jandi



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### 2.1. Peran Pemerintah Dalam Perekonomian

##### 1. Peran Alokasi

Yaitu peranan pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi yang ada agar pemanfaatannya bisa optimal dan mendukung efisiensi produksi. Pada dasarnya sumber daya yang dimiliki suatu negara adalah terbatas. Pemerintah harus menentukan seberapa besar dari sumber daya yang dimiliki akan dipergunakan untuk memproduksi barang-barang publik, dan seberapa besar akan digunakan untuk memproduksi barang-barang individu. Pemerintah harus menentukan dari barang-barang publik yang warganya, seberapa besar harus disediakan oleh pemerintah, dan seberapa besar yang dapat disediakan oleh rumah tangga perusahaan.

##### 2. Peran Distribusi

Yakni peranan pemerintah dalam mendistribusikan sumber daya kesempatan dan hasil-hasil ekonomi secara adil dan wajar. Menyangkut peran distribusi ini yang harus dilakukan pemerintah adalah :

- a. Pemerintah harus membuat kebijakan-kebijakan agar alokasi sumber daya ekonomi dilaksanakan secara efisien
- b. Pemerintah harus membuat kebijakan-kebijakan agar kekayaan distribusi secara baik dalam masyarakat, misalnya melalui kebijakan:
  - Perpajakan
  - Subsidi Pengentasan kemiskinan
  - Transfer penghasilan dari daerah kaya ke daerah miskin
  - Bantuan pendidikan
  - Bantuan kesehatan, dll

##### 3. Peran Stabilisasi

Yakni peranan pemerintah dalam memelihara stabilitas perekonomian dan memulihkannya jika berada dalam keadaan disequilibrium. Pemerintah

mempunyai peran utama sebagai alat stabilitas perekonomian. Pada pemerintahan modern saat ini, hampir semua negara menyerahkan roda perekonomiannya kepada pihak swasta / perusahaan. Pemerintah lebih berperan sebagai stabilisator, untuk menjaga agar perekonomian berjalan normal:

- 1) Menjaga agar permasalahan yang terjadi pada satu sektor perekonomian tidak merembet ke sektor lain.
- 2) Menjaga agar kondisi perekonomian kondusif:
  - inflasi terkendali
  - keamanan terjamin
  - kepastian hukum terjaga

## 2.2. Kemiskinan

### 1. Definisi Kemiskinan

Secara harfiah, kemiskinan berasal dari kata dasar miskin yang berarti "tidak berharta benda". Secara lebih luas kemiskinan dapat diartikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan baik secara individu, keluarga maupun kelompok yang dengan kondisi tersebut akan menimbulkan permasalahan sosial yang lain. Konsep tentang kemiskinan sangat beragam, mulai dari sekedar ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan memperbaiki keadaan, kurangnya kesempatan berusaha, hingga pengertian yang lebih luas yang memasukkan aspek sosial dan moral. Misalnya, ada pendapat yang mengatakan bahwa kemiskinan antarkait dengan sikap, budaya hidup, dan lingkungan dalam suatu masyarakat atau yang mengatakan bahwa kemiskinan merupakan ketidakberdayaan sekelompok masyarakat terhadap sistem yang diterapkan oleh suatu pemerintahan sehinggamereka berada pada posisi yang sangat lemah dan tereksplorasi (kemiskinan struktural).

Menurut Chambers yang dikutip oleh Britha Mikkelsen (2003:194) kemiskinan merupakan suatu keadaan melarat dan ketidak beruntungan yaitu suatu keadaan minus (deprivation) hal tersebut berkaitan dengan minimnya pendapatan dan harta, kelemahan fisik, isolasi, kerapuhan dan ketidakberdayaan. Kemiskinan merupakan masalah pokok nasional yang penanggulangannya tidak dapat ditundakan harus menjadi prioritas dalam melaksanakan pembangunan. Menurut Kartasmita (1993 : 34) adalah situasi serba kekurangan yang terjadi bukan hanya karena dikehendaki oleh si miskin,

melainkan karena tidak bias dihindari dengan kekuatan yang apa adanya. Kemiskinan moral, kemiskinan ilmu pengetahuan atau kemiskinan materiil. Namun untuk menyederhanakan pendekatan dalam mengatasinya, kita batasi artikemiskinan pada kemiskinan materiil yang diukur dengan rendahnya tingkat pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum. Definisi kemiskinan yang dirumuskan oleh BPS (2007 : 5-8) adalah sebagai berikut :

- 1 : merupakan kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan
- 2 : ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja.
- 3 : yaitu kemiskinan yang menggejala bukan oleh sebab- sebab yang alami atau oleh sebab-sebab yang pribadi, melainkan oleh sebab tatanan sosial yang tidak adil.
- 4 : yaitu diakibatkan oleh faktor-faktor adaptasi dan kebudayaan suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang tetap melekat dengan indikator kemiskinan. Konsep kemiskinan terkait dengan kemampuan seseorang atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar baik untuk makanan maupun non-makanan. Seseorang atau rumah tangga dikatakan miskin apabila kehidupannya dalam kondisi serba kekurangan, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

Batas kebutuhan dasar minimal dinyatakan melalui ukuran garis kemiskinan yang disetarakan dengan jumlah rupiah yang dibutuhkan (Badan Pusat Statistik). Dari beberapa pengertian kemiskinan tersebut diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa kemiskinan adalah suatu kondisi dimana sejumlah atau sekelompok orang yang mengalami situasi dimana pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari tidak terpenuhi yang dilator belakang oleh ketidak mampuan dalam bidang ekonomi, baik dari segi materi maupun non-materi yang dibandingkan dengan standar

kehidupan yang umum berlaku dalam kelompok masyarakat.

Kemiskinan dapat berakibat antara lain :

1. Secara sosial ekonomi dapat menjadi beban masyarakat
2. Rendahnya kualitas dan produktifitas masyarakat
3. Rendahnya partisipasi aktif masyarakat

4. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
5. Kemungkinan merosotnya mutu generasi

Strategi Bank Dunia dalam penanggulangan kemiskinan yang dikemukakan oleh Britha Mikkelsen (2003:192) yakni :

1. Membuka kesempatan ekonomi untu golongan miskin  
Mengembangkan pertumbuhan padat-karya Meningkatkan produktivitas perusahaan-perusahaan kecil dan petani kecil
2. Investasi dalam sumber daya manusia Memfokuskan pengeluaran pemerintah pada golongan miskin terutama perbaikan pendidikan dan pelayanan kesehatan

## 2. Penyebab Kemiskinan

Ditinjau dari sumber penyebabnya, kemiskinan dapat dibagi menjadi kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural. Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang mengacu pada sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh gaya hidup, kebiasaan hidup dan budayanya. Kemiskinan kultural biasanya dicirikan oleh sikap individu atau kelompok masyarakat yang merasa tidak miskin meskipun jika diukur berdasarkan garis kemiskinan termasuk kelompok miskin. Sedangkan kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh struktur masyarakat yang timpang, baik karena perbedaan kepemilikan, kemampuan, pendapatan dan kesempatan kerja yang tidak seimbang maupun karena distribusi pembangunan dan hasilnya yang tidak merata. Kemiskinan struktural biasanya dicirikan oleh struktur masyarakat yang timpang terutama dilihat dari ukuran-ukuran ekonomi.

Kemiskinan memang merupakan masalah multidimensi yang mencakup berbagai aspek kehidupan. Kondisi kemiskinan setidaknya disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut: Pertama, rendahnya taraf pendidikan dan kesehatan berdampak pada keterbatasan dalam pengembangan diri dan mobilitas. Hal ini berpengaruh terhadap daya kompetisi dalam merebut atau memasuki dunia kerja. Kedua, rendahnya derajat kesehatan dan gizi berdampak pada rendahnya daya tahan fisik, daya pikir dan selanjutnya akan mengurangi inisiatif. Ketiga, terbatasnya lapangan pekerjaan semakin memperburuk kemiskinan. Dengan bekerja setidaknya membuka kesempatan untuk mengubah nasibnya. Keempat, kondisi terisolasi (terpencil) mengakibatkan pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan lain-lain tidak dapat menjangkaunya. Kelima, ketidakstabilan politik berdampak pada ketidakberhasilan kebijakan pro-poor. Berbagai kebijakan dan program-program

penanggulangan kemiskinan akan mengalami kesulitan dalam implementasi jika tidak didukung oleh kondisi politik yang stabil.

### 3. Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan

Secara umum faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kemiskinan antara lain : pertumbuhan ekonomi (Todaro, 2003), pendidikan (Siregar dan Wahyuniarti, 2008), pengangguran (Todaro, 2003), kependudukan (Todaro, 2003), dan kesehatan (Myrdal, 2000).

#### a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan barang ekonomi kepada penduduknya yang ditentukan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian teknologi, institusional (kelembagaan), dan ideologi terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada menurut Todaro (2003). Menurut pandangan ekonom klasik, Adam Smith, David Ricardo, Thomas Robert Malthus, maupun ekonomi.

Neoklasik, Robert Solow dan Trover Swan, (dalam Todaro, 2003) menyatakan pada dasarnya ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu:

1. Jumlah penduduk
2. Jumlah stok barang modal
3. Luas tanah dan kekayaan alam
4. Tingkat teknologi yang digunakan

Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan atau berkembang apabila tingkat kegiatan ekonomi lebih tinggi dari pada sebelumnya. Sedangkan menurut Schumpeter, faktor utama yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi adalah proses inovasi dan pelakunya adalah inovator atau wiraswata. Menurut Boediono (1985) dalam Budhi (2013), pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Menurut Todaro (2003), ada tiga faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu:

#### a. Akumulasi Modal

UNIVERSITAS MEDAN AREA termasuk semua investasi baru yang berwujud, misalkan tanah, bangunan, peralatan fiskal, dan sumber daya manusia



(human resources). Akumulasi modal akan terjadi jika ada sebagian dari pendapatan sekarang di tabung kemudian diinvestasikan kembali dengan tujuan untuk memperbesar output di masa-masa yang akan datang.

#### b. Pertumbuhan Penduduk Angkatan Kerja

Pertumbuhan penduduk yang berhubungan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja secara tradisional telah dianggap sebagai faktor yang positif dalam pertumbuhan ekonomi. Artinya, semakin banyak angkatan kerja semakin produktif tenaga kerja, sedangkan semakin banyak penduduk akan meningkatkan potensi pasar domestiknya.

#### c. Kemajuan Teknologi

Kemajuan teknologi disebabkan oleh teknologi cara-cara baru dan cara-cara lama yang diperbaiki dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan tradisional. Ada tiga klasifikasi kemajuan teknologi, yaitu:

1. Kemajuan teknologi yang bersifat netral, terjadi jika tingkat output yang dicapai lebih tinggi dari kuantitas dan kombinasi-kombinasi input yang sama.
2. Kemajuan teknologi yang bersifat hemat tenaga kerja (*labour saving*) atau hemat modal (*capital saving*), yaitu tingkat output yang lebih tinggi yang bisa dicapai dengan jumlah tenaga kerja atau modal yang sama.
3. Kemajuan teknologi dalam meningkatkan modal, terjadi jika penggunaan teknologi tersebut memungkinkan kita memanfaatkan barang modal yang ada secara produktif.

#### d. Pendidikan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Tujuan pendidikan adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab (Siregar dan Wahyuniarti, 2008). Pendidikan dibagi tiga, yaitu:

### 1. Pendidikan Formal

Adalah jalur pendidikan yang struktur dan berjenjang yang terdiri atas

pendidikan dasar, menengah, dan tinggi jenjang pendidikan formal:

a. Pendidikan Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTS).

b. Pendidikan Menengah, merupakan lanjutan dari pendidikan dasar Pendidikan menengah terdiri atas, Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah (MA), serta bentuk lain yang sederajat.

c. Pendidikan Tinggi, merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan Diploma, Sarjana, dll.

### 2. Pendidikan Non Formal

Adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan dengan terstruktur dan berjenjang. Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi masyarakat yang membutuhkan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan pelengkap pendidikan formal.

### 3. Pendidikan Informal

Adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar mandiri. Hasil pendidikan informal diakui sama dengan pendidikan formal maupun informal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan.

### e. Pengangguran

Pengangguran adalah seseorang yang tergolong angkatan kerja dan ingin mendapat pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Masalah pengangguran yang menyebabkan tingkat pendapatan nasional dan tingkat kemakmuran masyarakat tidak mencapai

potensi maksimal yaitu masalah pokok makro ekonomi yang paling utama (Todaro, 2003).

#### 1. Jenis- jenis pengangguran:

Pengangguran sering diartikan sebagai angkatan kerja yang belum bekerja atau tidak bekerja secara optimal. Berdasarkan pengertian diatas, maka pengangguran dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu:

a. Pengangguran Terselubung (*Disguised Unemployment*) adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu.

b. Menganggur (*Under Unemployment*) adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan, biasanya tenaga kerja setengah menganggur ini merupakan tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu.

c. Pengangguran Terbuka (*Open Unemployment*) adalah tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran jenis ini cukup banyak karena memang belum mendapat pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal.

#### 2. Macam-macam pengangguran

Berdasarkan penyebab terjadinya dikelompokkan menjadi beberapa jenis, yaitu:

a. Pengangguran konjungtural (*Cycle Unemployment*) adalah pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan gelombang (naik-turunnya) kehidupan perekonomian/siklus ekonomi.

b. Pengangguran struktural (*Struktural Unemployment*) adalah pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan struktur ekonomi dan corak ekonomi dalam jangka panjang. Pengangguran struktural bisa diakibatkan oleh beberapa kemungkinan, seperti: akibat permintaan berkurang, akibat kemajuan dan teknologi, dan akibat kebijakan pemerintah.

c. Pengangguran friksional (*Frictional Unemployment*) adalah pengangguran yang muncul akibat adanya ketidaksesuaian antara pemberi kerja dan pencari kerja. Pengangguran ini sering disebut pengangguran sukarela.

UNIVERSITAS MEDAN AREA Pengangguran musiman adalah pengangguran yang muncul

akibat pergantian musim misalnya pergantian musim tanam ke musim panen.

e. Pengangguran teknologi adalah pengangguran yang terjadi akibat perubahan atau penggantian tenaga manusia menjadi tenaga mesin-mesin.

2. Pengangguran siklus adalah pengangguran yang diakibatkan oleh menurunnya kegiatan perekonomian (karena terjadi resesi). Pengangguran siklus disebabkan oleh kurangnya permintaan masyarakat (agrerat demand). Indikator pengangguran terbuka yang digunakan oleh BPS adalah tingkat pengangguran terbuka (TPT). Menurut Tambunan (2001), pengangguran dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan dengan berbagai macam cara, antara lain:

1. Jika rumah tangga memiliki batasan likuiditas, yang berarti bahwa konsumsi saat ini sangat dipengaruhi oleh pendapatan saat ini, maka bencana pengangguran akan secara langsung mempengaruhi income poverty rate dengan consumption poverty rate.

2. Jika rumah tangga tidak menghadapi batasan likuiditas, yang berarti bahwa konsumsi saat ini tidak terlalu dipengaruhi oleh pendapatan saat ini, maka peningkatan pengangguran akan menyebabkan peningkatan kemiskinan dalam jangka panjang, tetapi tidak terlalu berpengaruh dalam jangka pendek. Tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang cepat dan pertumbuhan lapangan pekerjaan yang relatif lambat menyebabkan masalah pengangguran yang ada.

#### f. Kependudukan

Penduduk mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan suatu wilayah. Karena itu perhatian terhadap penduduk tidak hanya dari sisi jumlah, tetapi juga kualitas. Penduduk yang berkualitas merupakan modal bagi pembangunan dan diharapkan dapat mengatasi berbagai akibat dari dinamikapenduduk (BPS, 2011). Pertumbuhan penduduk yang cepat akan berpengaruh terhadap tingkat kepadatan penduduk di wilayah tersebut. Kepadatan penduduk dapat didefinisikan sebagai jumlah orang persatuan luas lahan (per km<sup>2</sup>, per mil) di suatu daerah. Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat diakibatkan karena tingginya angka kelahiran di suatu wilayah tersebut. Salah satu implikasinya akan tingginya angka kelahiran adalah banyaknya jumlah anak-anak di wilayah tersebut.

Dengan demikian, jumlah angkatan kerja secara otomatis menanggung beban yang lebih banyak untuk menghidupi anak-anak di bawah usia 14 tahun. Penduduk yang berusia lanjut maupun yang masih anak-anak secara ekonomis disebut beban ketergantungan artinya, mereka merupakan anggota masyarakat yang tidak produktif, sehingga menjadi beban angkatan kerja yang produktif (Todaro, 2003). Laju pertumbuhan maupun penurunan penduduk tidak cukup menggambarkan kondisi kemiskinan tersebut di suatu daerah. Dalam hubungannya dengan tingkat kemiskinan, selain jumlah penduduk harus memperhatikan pada variabel lainnya, misalnya kesejahteraan masyarakat di daerah itu, tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat, tingkat penyerapan tenaga kerja, serta laju pertumbuhan ekonomi. Sehingga jumlah penduduk yang diimbangi dengan perbaikan dalam pembangunan manusia seharusnya mampu mengurangi tingkat kemiskinan di daerah tersebut (BPS, 2010).

#### g. Kesehatan

Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan (Myrdal, 2000). Pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dan mendukung pembangunan ekonomi, serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Langkah-langkah yang telah ditempuh adalah peningkatan akses kesehatan terutama bagi penduduk miskin melalui pelayanan kesehatan gratis; peningkatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular termasuk polio dan flu burung; peningkatan kualitas, keterjangkauan dan pemerataan pelayanan kesehatan dasar; peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan; penjaminan mutu, keamanan dan khasiat obat dan makanan; penanganan kesehatan di daerah bencana; serta peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat (Myrdal, 2000).

Kemampuan untuk bertahan hidup lama diukur dengan indikator harapan hidup pada saat lahir (life expectancy at birth/e0). Angka e0 untuk tingkat provinsi yang disajikan merupakan hasil penghitungan secara tidak langsung dengan menggunakan paket program Mortpack berdasarkan data rata-rata jumlah anak lahir dengan rata-rata jumlah anak masih hidup yang menurut umur ibu 15-49 tahun, yang bersumber dari data hasil Survei Sosial Ekonomi

## Nasional

(Susenas) dengan memperlihatkan tren hasil sensus penduduk. Selain angka kematian bayi, Angka Harapan Hidup (AHH) juga digunakan sebagai indikator untuk menilai derajat kesehatan penduduk. Semakin tinggi nilai angka harapan hidup di suatu wilayah, maka mengindikasikan pembangunan sosial ekonomi terutama yang terkait dengan fasilitas kesehatan wilayah tersebut semakin maju. Semakin maju pembangunan daerah di bidang kesehatan menunjukkan tingkat kesehatan yang ada dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat termasuk masyarakat miskin.

Berdasarkan teori mengenai lingkaran kemiskinan yang dikemukakan Myrdal bahwa semakin tinggi tingkat kesehatan masyarakat yang ditunjukkan dengan meningkatnya nilai AHH maka produktivitas akan semakin meningkat. Peningkatan produktivitas dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi yang nantinya akan menurunkan tingkat kemiskinan. Artinya semakin meningkat angka harapan hidup maka tingkat kemiskinan akan menurun.

## BAB III

### METODOLOGI PELAKSANAAN KKL

#### 1.1. Tempat dan Waktu KKL

##### 1. Tempat Kuliah Kerja Lapangan

Pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) dilaksanakan di Kantor Kepala Desa Jandi. Kantor Kepala Desa Jandi Terletak di Kecamatan Juhar Kabupaten Karo.

##### 2. Waktu pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan (KKL)

Dimulai pada tanggal 13 Juli 2020 s/d 13 Agustus 2020, Waktu Pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan Dimulai pada pukul 10.00-15.00 WIB.

#### 1.2. Metodologi Pelaksanaan KKL

Tata cara pelaksanaan KKL dimulai Senin 13 juli 2020,

Senin, 13 juli 2020 : Pada hari pertama penulis melakukan perkenalan kepada seluruh kepala desa dan perangkat desa

Selasa, 14 juli 2020 : hari selanjutnya penulis ikut berpartisipasi dalam kegiatan kebersihan kantor kades

Rabu, 15 juli 2020 : dihari selanjutnya penulis kemabali melakukan gotong royong

Kamis, 16 juli 2020 : dihari selanjutnyamembersihakn selokan pekarangan desa jandi

Jumat, 17 juli 2020 : Penulis melakukan pemasangan horden dan taplak meja kantor kepala desa Jandi

Senin, 20 juli 2020 : penulis melakukan gotong royong dengan masyarakat desa jandi

Selasa, 21 juli 2020 : piket kantor desa

Rabu, 22 juli 2020 : piket kantor desa

Kamis, 23 juli 2020 : piket kantor desa

Jumat, 24 juli 2020 : gotong royong dengan karang taruna desa Jandi

Untuk hari sabtu kantor kepala desa Jandi Libur

Senin, 27 juli 2020 : Piket menjaga posko covid 19

Selasa, 28 juli 2020 : piket menjaga posko covid 19

Rabu, 29 juli 2020 : piket menjaga posko covid 19

Kamis, 30 juli 2020 : pendataan coklit 2020

Jumat, 31 juli 2020 : Libur Hari Raya Idul Adha

Untuk hari sabtu kantor kepala desa jandi Libur

Senin, 03 agustus 2020 : pendataan coklit 2020

Selasa, 04 agustus 2020 : pendataan coklit 2020

Rabu, 05 agustus 2020 : pendataan coklit

Kamis , 06 agustus 2020 : pembagian BLT DD tahap 2

Jumat, 07 agustus 2020 : pembagian BLT DD tahap 2

Untuk hari sabtu kantor kepala desa Jandi libur

Senin 10 agustus 2020 : Pelayanan posyandu

Selasa 11 agustus 2020 : acara perpisahan dengan karang taruna desa Jandi

Rabu 12 agustus 2020 : acara pemberian plakat bersama kepala desa dan perangkat desa untuk kenang kenangan kepada desa Jandi

### 1.3. Rangkuman Pekerjaan yang dilakukan selama KKL

Gotong royong dan membantu masyarakat desa Jandi menjadi lebih dominan yang penulis lakukan selama masa Kuliah Kerja Lapangan (KKL), dimana untuk masalah yang menyangkut tentang dana desa atau hal-hal lain dalam Pemerintahan Desa tidak ada berjalan dikarenakan situasi pandemi covid 19. Hal ini membuat penulis menemukan beberapa kerja Kepala Desa Jandi untuk melawan covid 19, mulai dari pemberian BLT DD dan Bansos, juga tetap menjaga pekarangan lingkungan masyarakat bersih dan terhindar dari covid 19, selain itu ada juga yang melakukan pelayanan posyandu terhadap balita.



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Judul : Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada Masyarakat Miskin

Hasil dan Pembahasan didapat dari wawancara dan diskusi dengan Staff kepala desa Jandi antara lain tata cara sasaran untuk penerima BLT, mekanisme tahapan program BLT

#### 1.1. Hasil dan Pembahasan

BLT merupakan salah satu jaringan pengaman sosial (JPS) dalam rangka meminimalisir dampak kenaikan BBM bagi masyarakat miskin untuk memebuhikebutuhan hidupnya. Bantuan Langsung Tunai atau cash transfer merupakan subsidi yang diberikan langsung kepada masyarakat miskin berupa uang tunai.

Tujuan dari program bantuan langsung tunai (BLT) bagi rumah tangga sasaran dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM adalah:

1. Membantu masyarakat miskin agar dapat tetap memenuhi kebutuhan dasarnya.
2. Mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi
3. Meningkatkan tanggung jawab sosial bersama.

Penerima bantuan langsung tunai adalah rumah tangga sasaran sebanyak 19,1 juta rumah tangga sasaran hasil pendataan BPS. Yang meliputi rumah tangga sangat miskin (poorest), rumah tangga miskin (poor), dan rumah tangga hampir miskin (near poor) di seluruh wilayah Indonesia.,

Dari keterangan yang diperoleh penulis, diketahui bahwa indikator awal yang digunakan adalah tingkat pendapatan orang miskin atau dikenal dengan gariskemiskinan. Dengan menggunakan definisi BPS, pemerintah

menyatakan bahwa seseorang disebut mendekati miskin dan berhak memperoleh dana BLT jika memiliki tingkat pendapatan di bawah Rp 175 ribu per bulan. Tentunya angka ini merupakan angka rata-rata dari pendapatan seluruh anggota rumah tangga, sehingga jika dikembalikan kepada definisi dari rumah tangga miskin, maka angka ini perlu dikalikan dengan rata-rata jumlah anggota rumah tangga, yang diasumsikan sama dengan 4 orang. Implikasinya, rumah tangga dikatakan mendekati miskin dan memperoleh dana BLT jika memiliki pendapatan kurang

Secara umum, tahapan yang dilaksanakan berkaitan dengan penyaluran dana BLT-RTS adalah :

- a. Sosialisasi program bantuan langsung tunai dilaksanakan oleh Departemen Komunikasi dan Informatika, Departemen Sosial, bersama dengan Kementrian/Lembaga di Pusan bersama Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/ kota, Aparat Kecamatan dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (Karang Taruna, Kader Taruna Siaga Bencana (TAGANA), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.
- b. Penyiapan data rumah tangga sasaran dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS pusat) . Daftar nama dan alamat yang telah tersedia disimpan dalam sistem database BPS, Departemen Sosial, dan PT Pos Indonesia.
- c. Pengiriman data berdasarkan nama dan alamat Rumah Tangga Sasaran dari BPS Pusat ke PT Pos Indonesia.
- d. Pencetakan KKB Bantuan Langsung Tunai Untuk Rumah Tangga Sasaran (KKB) berdasarkan data yang diterima oleh PT Pos Indonesia
- e. Penandatanganan KKB oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- f. Pengiriman KKB ke Kantor Pos seluruh Indonesia

- g. Pengecekan kelayakan daftar Rumah Tangga Sasaran di tingkat Desa/Kelurahan.
- h. Penerima Program Keluarga Harapan juga akan menerima BLT-RTS, sehingga dimasukkan sebagai Rumah Tangga Sasaran yang masuk dalam daftar.
- i. Pembagian KKB kepada Rumah Tangga Sasaran oleh Petugas Kantor Pos dibantu aparat desa/ kelurahan, Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat, serta aparat keamanan setempat jika diperlukan.
- j. Pencairan BLT-RTS oleh Rumah Tangga Sasaran berdasarkan KKB di Kantor Pos atau di lokasi-lokasi pembayaran yang telah ditetapkan.
- k. Pembayaran terhadap penerima KKB dilakukan untuk periode Juni s.d Agustus sebesar Rp. 300.000,- dan periode September s.d Desember sebesar Rp.400.000,-. Penjadwalan pembayaran pada setiap periode menjadi kewenangan dari PT. Pos Indonesia.
- l. Jika kondisi penerima KKB tidak memiliki identitas sebagai persyaratan kelengkapan verifikasi proses bayar, maka proses bayar dilakukan dengan verifikasi bukti diri yang sah (KTP, SIM, Kartu Keluarga, Surat Keterangan dari Kelurahan, dll).
- m. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyaluran BLTRTS oleh tim terpadu.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### 1.1. Kesimpulan

Melihat dari banyaknya dampak negatif yang akan ditimbulkan oleh kebijakan BLT ini, kebijakan BLT tidak efektif dan efisien jika diterapkan dalam jangka panjang. Ini disebabkan nominal BLT yang diberikan tidak seimbang dengan kenaikan biaya hidup yang ditanggung oleh masyarakat akibat kenaikan harga BBM. Kenaikan BBM akan mendorong kenaikan biaya untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin, mendorong kenaikan biaya input produksi masyarakat miskin yang kebanyakan berada pada sektor pertanian (baik petani maupun nelayan) yang berada di pedesaan. Apabila kita membandingkan total kenaikan biaya hidup (biaya pemenuhan kebutuhan dasar dan input produksi) masyarakat miskin dengan nominal dana BLT yang diberikan. Selain itu, dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan BLT tersebut tidak mampu memberikan dampak positif pada peningkatan produktifitas masyarakat miskin, melainkan kecenderungannya memberikan dampak negatif pada penurunan produktifitas.

Maka penulis menawarkan solusi agar Bantuan Langsung Tunai menjadi bantuan dana yang efektif dan efisien dengan mememanajementi penyaluran dana yang baik dan sistematis, pengawasan terhadap penyaluran dana BLT, bantuan dana yang diperuntukkan untuk suntikan dana wirausaha, agar masyarakat dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru dan menjadi masyarakat yang mandiri. Dengan solusi tersebut bantuan langsung tunai yang diberikan dalam jangka pendek akan memberikan manfaat kepada masyarakat dalam jangka panjang.

#### 1.2. Saran

Penulis Sadar dalam melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) ini masih banyak kekurangan. Selain itu, Laporan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) ini juga masih jauh dari kata sempurna, Oleh karena itu, saran yang membangun sangat penulis perlu guna memperbaiki laporan yang masih jauh dari kata sempurna.

## DAFTAR PUSTAKA

Mikkelsen, Britha. (2003). *Strategi Bank Dunia*. Jakarta : Media Group. Hal. 192

Desa Jandi, Profil. (2017). *Desa Jandi*

Kartasasmita. (1993). *Tentang Kemiskinan*. Jakarta. Hal. 34

Sutrisno, Edy. (2011). *Budaya Organisasi*. Cetakan Kedua, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

## LAMPIRAN



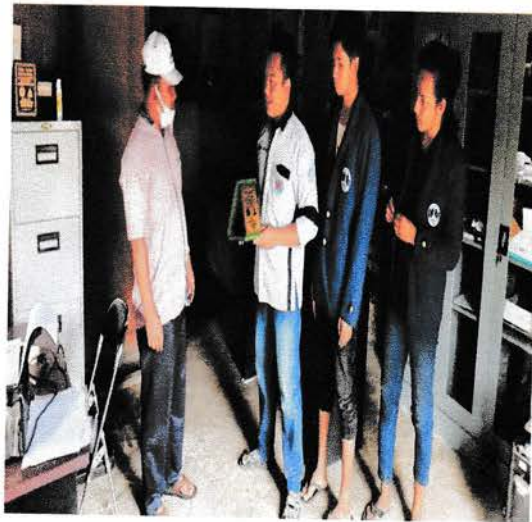
*Foto dengan pelayanan posyandu*



*Kegiatan Pemasangan bendera di kantor kades*



*Pembagian BLT Tahap ke 3*



*Acara Perpisahan Dengan Kepala Desa*

## 3. Surat Persetujuan Dari Desa



**PEMERINTAH KABUPATEN KARO**  
**KANTOR KEPALA DESA JANDI**  
**KECAMATAN JUHAR**  
**KODE POS 22163**

Nomor : 100/07/DJ/2020  
 Lampiran :-  
 Hal : Persetujuan Kuliah Kerja Lapangan ( KKL )

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Jandi Kecamatan Juhar Kabupaten Karo dengan ini menerangkan bahwa, Benar-benar memberikan **Persetujuan** bagi mahasiswa Universitas Medan Area yang melaksanakan kuliah kerja lapangan di desa Jandi, Kec. Juhar, Kab. Karo.

NO	NAMA MAHASISWA	NPM
1	Berry Harkiventa Ginting	178510037
2	Ariel Apriando Manihuruk	178510027
3	Andrison Purba	178510028

Jandi, 13 Juli 2020  
 Kepala Desa Jandi



Minggu II